

**EVALUASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI  
KOTA TANGERANG SELATAN****Ayuni Damayanti Putri<sup>1</sup>, Fiona Kirana Oktavia<sup>2</sup>**Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Jakarta.\*Email: ayuni\_dp.22010500002@student.umj.ac.id,  
fiona\_ko.22010500009@student.umj.ac.id**Abstrak**

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dengan berbagai aktifitas yang dijalannya sehari-hari akan memberikan dampak pada limbah produksi atau sampah yang dihasilkan dalam proses kehidupan tersebut. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki permasalahan keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dimana masyarakatnya menghasilkan  $\pm$  400 ton sampah per hari, padahal apabila sampah dikelola dengan baik mulai dari pengurangan hingga penanganannya, permasalahan lahan bukanlah menjadi masalah yang besar. Berbagai strategi mulai dari 3R (*Reduse, Reuse, dan Recycle*), Bank Sampah, Komposter, Eco-Enzim, Maggot dan lain sebagainya dapat diterapkan guna mengurangi penumpukan sampah yang menjadi polemik Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan dari pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan belum cukup baik karena terdapat beberapa indikator kriteria evaluasi yang belum terpenuhi dari aspek (1) Efektifitas yaitu program pengurangan dan penanganan sampah belum dirasakan manfaatnya karena masih banyaknya timbulan sampah, (2) Efisiensi dimana Kota Tangerang Selatan masih tergantung pada TPA kota lain, (3) Kecukupan, terbatasnya lahan TPA Cipeucang sehingga timbulnya permasalahan baru serta keterbatasan sarana dan prasarana, (4) Perataan program pengurangan sampah sudah berjalan pada kalangan masyarakat dan edukasi sosial mengenai sampah pada tingkat sekolah hingga kampus, (5) Responsivitas, Pemerintah Kota Tangerang Selatan merespon baik kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan melakukannya semaksimal mungkin dan, (6) Ketepatan, belum memenuhi indikator tepat karena masih banyak permasalahan yang harus dibenahi mulai dari pengurangan sampah pada skala rumah tangga (sumber) hingga skala kawasan.

**Kata Kunci** : Evaluasi Kebijakan ; Strategi ; Pengelolaan Sampah.**Abstract**

*Increasing population growth with various activities that they carry out daily will have an impact on production waste or waste generated in the life process. The South Tangerang City Government has the problem of limited land for the Final Processing Site (TPA) where the community produces  $\pm$  400 tons of waste per day, even though if waste is managed properly from reduction to handling, land problems are not a big problem. Various strategies ranging from 3R (*Reuse, Reuse, and Recycle*), Garbage Bank, Composter, Eco-Enzyme, Maggot and so on can be applied to reduce the accumulation of waste which has become a polemic for the City of South Tangerang. The results of this*

**How to cite:**Ayuni Damayanti Putri, Fiona Kirana Oktavia (2023), Evaluasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan, (5) 8, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416>**E-ISSN:**

2684-883X

**Published by:**

Ridwan Institute

*study indicate that the policy evaluation of waste management in South Tangerang City is not good enough because there are several indicators of evaluation criteria that have not been fulfilled from the aspect of (1) Effectiveness, namely the waste reduction and handling program, the benefits have not been felt because there is still a lot of waste generation, (2) Efficiency where the City of Tangerang Selatan still depends on TPA in other cities, (3) Adequacy, limited land for Cipeucang TPA so that new problems arise and limited facilities and infrastructure, (4) Flattening of the waste reduction program has been running among the community and social education regarding waste at the level schools to campuses, (5) Responsiveness, the South Tangerang City Government responds well to policies from the Central Government by doing as much as possible and, (6) Accuracy, not meeting the right indicators because there are still many problems that need to be addressed starting from reducing waste at the household scale ( sources) to regional scale.*

**Keywords :** *Policy Evaluation ; Strategy ; Waste Management.*

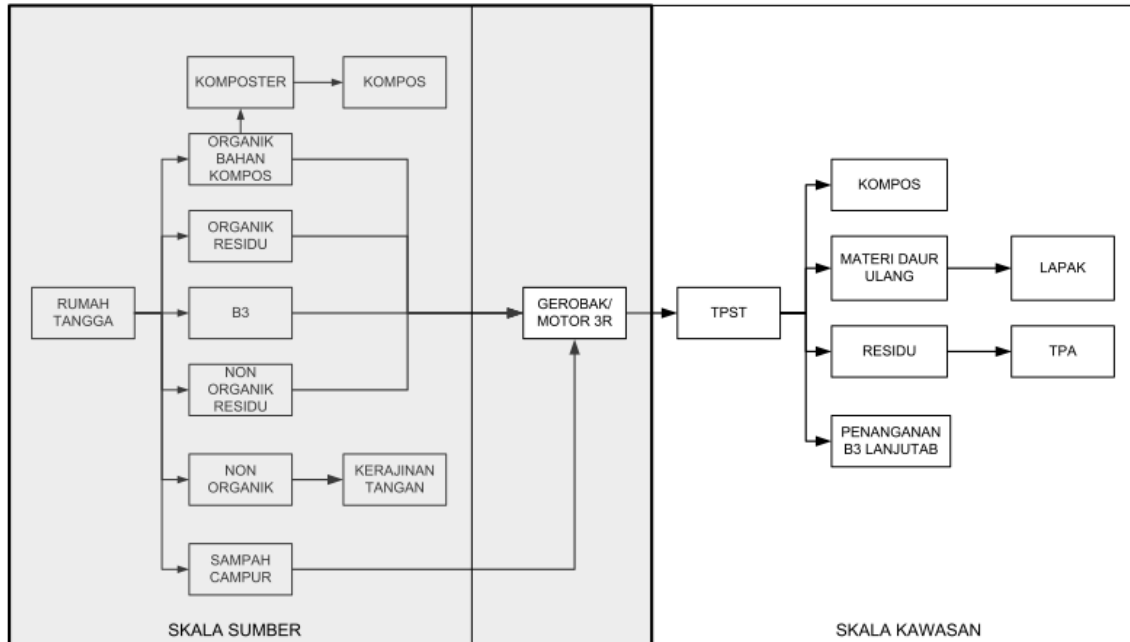
## **PENDAHULUAN**

Seiring berjalannya waktu dan penambahan penduduk di Negara Indonesia maka akan memberikan dampak pula terhadap kenaikan limbah hasil produksi dari segala aktifitas harian yang dilakukan oleh warga masyarakat yaitu persoalan mengenai sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (MENDAGRI, 2008) menyebutkan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang padat. Pengelolaan sampah haruslah tepat dan segera dilakukan karena apabila timbunan sampah terjadi maka akan membahayakan kehidupan manusia dan alam sekitar antara lain resiko ancaman penyakit yang ditimbulkan dari sampah, kualitas udara yang memburuk, pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi.

Timbunan pada sampah akan memberikan dampak negatif pada keberlangsungan hidup serta membahayakan lingkungan (Addahlawi et al., 2019). Berbagai penyakit yang mengintai antara lain yaitu *Thypus* dengan pembawa penyakitnya adalah hewan-hewan yang berkembang biak pada timbunan sampah tersebut seperti tikus, lalat, kecoa dan lain sebagainya sehingga mengurangi estetika dari lingkup dalam suatu perkotaan tersebut serta timbulnya aroma tidak sedap akan mengganggu sistem pernafasan manusia.

Masyarakat diharapkan dapat berlaku bijak terhadap pengelolaan sampah dengan mengubah pandangan atau perspektif bahwa sampah merupakan sebuah sumber daya yang dapat memberikan manfaat apabila diolah lagi dengan baik dan benar, sehingga muncul sebuah konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) (HIDAYAT, 2021). Dalam pengelolaan 3R tidak hanya menyangkut mengenai teknis semata namun jauh lebih penting yaitu menyangkut pola pikir, perubahan sikap, dan masalah sosial demi mewujudkan masyarakat dengan kawasan lingkungan yang ramah serta berkelanjutan. Dalam bukunya Departemen Pekerjaan Umum (Departemen Pekerjaan Umum, 2008) menjelaskan bahwa prinsip pertama adalah *Reduce* yaitu segala upaya atau aktifitas yang dapat dilakukan guna mencegah dan mengurangi timbunan sampah. Prinsip kedua adalah *Reuse* yaitu sebuah kegiatan yang bertujuan untuk penggunaan kembali sampah layak pakai untuk fungsi sama atau fungsi yang lainnya. Prinsip ketiga adalah *Recycle* yaitu

aktifitas atau kegiatan pengelolaan sampah untuk dijadikan produk baru yang layak pakai. Berikut ini merupakan sebuah skema atau konsepsi penanganan sampah pada skala rumah tangga (sumber) dan skala Kawasan yaitu sebagai berikut ;



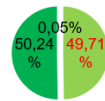
**Gambar 1. Penanganan Sampah 3R**

Persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab dari beberapa pihak saja, namun sudah menjadi tugas serta tanggung jawab seluruh masyarakat tidak terkecuali (Suryani, 2014). Dalam menjalankan pengelolaan sampah yaitu pengurangan serta penanganan yang tepat, maka isu mengenai sampah sangat penting dan menjadi perhatian dari pemerintah baik itu pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, sehingga diperlukannya sebuah regulasi yang mengatur jelas mengenai pengelolaan sampah secara cepat dan tepat (Rifani & Jalaluddin, 2019). Hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (*PP\_81\_2012.Pdf*, n.d.) yang menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pada setiap kota/kabupaten memiliki caranya tersendiri dalam mengatasi persoalan timbulan sampah, mulai dengan prinsip 3R hingga solusi terakhir pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kota Tangerang Selatan memiliki polemik permasalahannya tersendiri yaitu dimana jumlah sampah meningkat cepat yang disebabkan oleh peningkatan populasi serta meningkatnya ekonomi, tidak ada pemisah antara sampah organik/anorganik pada tahap pembuangan, rata-rata timbulan sampah perjiwa 0,59 kg/jiwa/hari, dan sampah yang dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebanyak 400 ton/hari (*Persampahan DLH 2023*, n.d.). Keterbatasan lahan TPA yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan menjadi

permasalahan yang sangat serius sehingga dibutuhkannya jalan keluar guna mengatasi masalah tersebut. Berikut ini merupakan data timbulan sampah dan komposisi sampah berdasarkan sumber Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan ;

<u>Kecamatan</u>	<u>Jumlah Penduduk</u>	<u>Unit Timbulan Sampah (kg/jiwa/hari)</u>	<u>Timbulan Sampah (Ton/hari)</u>
<u>Pondok Aren</u>	392.284	0,59	231,45
<u>Ciputat Timur</u>	211.003	0,59	124,49
<u>Ciputat</u>	239.152	0,59	141,10
<u>Serpong Utara</u>	179.993	0,59	106,20
<u>Pamulang</u>	350.923	0,59	207,04
<u>Setu</u>	86.783	0,59	51,20
<u>Serpong</u>	184.761	0,59	109,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.644.899</b>	<b>0,59</b>	<b>970,49</b>



<u>JENIS</u>		<u>PERSENTASI (%)</u>	
<u>Organik</u>		49,71	
<u>Non organik</u>	<u>Kertas</u>	13,45	16,37
	<u>PET</u>	7,55	
	<u>Plastik</u>	9,82	
	<u>Kain/tekstil</u>	0,67	50,24
	<u>Karet/kulit</u>	0,48	
	<u>Logam</u>	0,38	
	<u>Gelas/kaca</u>	0,85	
	<u>Lain-lain</u>	17,05	
<u>B3 Domestik</u>		0,05	

**Gambar 2. Timbulan dan Komposisi Sampah**

Berdasarkan penjelasan diatas memberikan asumsi bahwa setelah dikeluarkannya kebijakan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah hingga Peraturan Walikota No. 83 tahun 2022 tentang Pengurangan Sampah Plastik dibutuhkannya kegiatan evaluasi guna melakukan penilaian sejauh mana efektifitas kebijakan tersebut dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Setelah melakukan pelaksanaan terhadap kebijakan tersebut, masih terdapat masalah-masalah yang harus dievaluasi lagi antara lain yaitu timbulan sampah yang meningkat, masih terdapat Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) liar, keterbatasan lahan TPA, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sarana dan prasarana, serta belum diterapkannya teknologi di di TPA.



**Gambar 3. Permasalahan Sampah di Kota Tangerang Selatan**

Maka dari itu dibutuhkannya proses evaluasi kembali terhadap kebijakan yang sudah diterapkan untuk mengatasi permasalahan sampah yang dihadapi oleh Kota Tangerang Selatan. Bukan hanya peran dari pihak pemerintah saja namun peran serta seluruh masyarakat untuk mendukung sebuah gerakan atau kegiatan guna mengurangi serta menangani persoalan sampah.

***Evaluasi Kebijakan.***

Sebuah kegiatan dimana untuk menilai sejauh mana tujuan telah dicapai, melihat sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan pada konstituen, dan sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan merupakan deifinisi dari Evaluasi.

Menurut Hertati (2021) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan, estimasi yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan terhadap kebijakan tersebut.

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Abdurahman et al., (2021) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam meperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.

2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan- keadaan sekarang dan yang akan datang.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Kemudian untuk mengevaluasi dampak pada suatu program berdasarkan kebijakan publik terkait, diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur sebuah kebijakan publik atau keberhasilan program tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan public sebagai berikut ;

1. Efektifitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lembong et al., 2017). Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan-kegiatan (Jibril, 2017).

Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Efisiensi.

Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu (Winarta et al., 2020). Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan.

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Akibu, 2014). Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan.

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik (Mandas et al., 2018a). Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

5. Responsivitas.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas (Mandas et al., 2018b). Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan.

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Sehingga untuk mengevaluasi sebuah kebijakan diperlukannya sebuah indikator-indikator keberhasilan sebagai acuan apakah sebuah kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik atau tidak.

***Strategi Pengelolaan Sampah.***

Bahri (2015) menjelaskan bahwa strategi adalah sebuah upaya atau cara untuk mengerjakan sesuatu dengan harapan mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Sedangkan menurut Dhuka (2022) mendefinisikan bahwa strategi merupakan sebuah proses penentuan rencana oleh seorang pemimpin dengan fokus pada tujuan atau jangka panjang supaya tujuan tersebut dapat dicapai.

Kemudian pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan meliputi pengurangan (dengan cara 3R *Reduce, Reuse, dan Recycle*) dan penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir).

Dalam pelaksanaan strategi pengelolaan sampah, diperlukannya kegiatan terpadu, pemberdayaan secara terprogram, dan berkelanjutan sehingga dapat tercapainya perilaku atau kebiasaan masyarakat pada strategi yang telah ditentukan. Dalam proses pemberdayaan tersebut meliputi antara lain yaitu penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, memberikan contoh, memberikan pelatihan, kemudian mengembangkan kegiatan strategi, dan lainnya.

Sehingga dalam mengatasi sebuah masalah, diperlukannya strategi yang tepat serta efektif supaya masalah tersebut dapat teratasi dengan cepat dan memuaskan berbagai pihak, baik itu masyarakat maupun pemerintah.

Sejauh ini pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui strategi 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sudah diterapkan sebagai program karena berkaitan dengan kebijakan dan strategi nasional pengembangan pengelolaan persampahan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya.



## **METODE PENELITIAN.**

Untuk mengumpulkan sebuah data dalam sebuah penelitian, diperlukannya metode yang sesuai dan tepat, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Moleong (2007 : 4) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif (*Viewer @ Library.Stik-Ptik.Ac.Id*, n.d.) menjelaskan bahwa penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati merupakan sebuah istilah penelitian kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN.**

### **1. Eksisting Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan.**

Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, penanganan persoalan sampah menggunakan dua pendekatan tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pada Bab VI pasal 19, yaitu ;

#### **1. Pengurangan Sampah (Peran Serta Masyarakat).**

Pengurangan sampah dilakukan meliputi kegiatan (1) Pembatasan timbulan sampah, (2) Pendaauran ulang sampah, dan (3) Pemanfaatan kembali sampah, kemudian bentuk implementasi dari Kota Tangerang Selatan atas kebijakan tersebut adalah dengan menggunakan strategi Bank Sampah sebanyak 351 unit 540,5 ton/tahun, TPS 3R sebanyak 41 unit 39.409 ton/tahun, Komposting Rumah sebanyak 1.731 unit 667 ton/tahun, Rumah Minim Sampah sebanyak 255 unit 280 ton/tahun, dan terakhir yaitu Pemulung/Lapak sebanyak  $\pm$  1.900 jiwa 10.403 ton/tahun.

#### **2. Penanganan Sampah (Peran Pemerintah Daerah).**

Kegiatan penanganan sampah meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir, kemudian bentuk implementasi dari Kota Tangerang Selatan atas kebijakan tersebut adalah dengan menggunakan strategi UPT TPST Cipeucang  $\pm$  400 ton/hari, kemudian karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh TPST Cipeucang maka dilakukannya kerja sama dengan TPAS Cilowong Serang, dan TPAS Lulut Nambo Jawa Barat, serta Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang sedang dalam tahap penyusunan FBC (studi kelayakan).

Kemudian untuk alur dari penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan dibagi menjadi dua yaitu penanganan skala rumah tangga (sumber) dan penanganan skala kawasan.

Untuk penanganan skala rumah tangga (sumber) sampah tersebut dipilah mulai dari sampah rumah tangga, pasar, perkantoran, industri, taman, dan jalanan, selanjutnya dilakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya yaitu komposter yang bisa dijadikan kompos, organik bahan kompos, organik residu, B3, non organik residu, non organik yang bisa dijadikan kerajinan tangan, kemudian terakhir sampah campuran yang

dilanjutkan pada penanganan skala Kawasan. Berikut merupakan data TPS 3R yang berada di Kota Tangerang Selatan, yaitu ;

**Tabel 1. Data TPS 3R Kota Tangerang Selatan**

NO	URAIAN	JUMLAH TPS 3R	JUMLAH SAMPAH PERHARI	KETERANGAN
1.	TPS 3R TERBANGUN	51 TPS 3R	--	4 APBN 47 APBD
2.	TPS 3R AKTIF 3R	14 TPS 3R	12 TON/ HARI	AKTIF DALAM PEMILAHAN DAN PENGOMPOSAN SAMPAH
3.	TPS 3R AKTIF (TANPA PENGOMPOSAN)	13 TPS 3R	11 TON/ HARI	AKTIF DALAM PEMILAHAN NAMUN TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN PENGOMPOSAN
4.	TPS 3R AKTIF (TRANSIT)	18 TPS 3R	22,6 TON/ HARI	SEBAGAI TEMPAT TRANSIT SAMPAH TANPA PEMILAHAN DAN KEGIATAN PENGOMPOSAN
5.	TPS 3R TIDAK AKTIF	6 TPS 3R	--	TPS 3R SUDAH TUTUP TANPA KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH.

*Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan*

Untuk penanganan skala Kawasan, sampah yang berasal di TPST diolah kembali menjadi kompos, materi daur ulang, residu (dilanjutkan pada TPA), dan penanganan B3 lanjutan. Sehingga sebelum sampah tersebut sampai pada tempat pemrosesan akhir maka harus diolah dulu sedemikian rupa pada skala rumah tangga dengan tujuan pengurangan timbulan sampah serta pemanfaatan kembali sampah yang masih dapat didaur ulang.

Karena kurangnya sosialisasi serta pemahaman dari masyarakat Kota Tangerang Selatan akan penanganan sampah pada skala rumah tangga, maka volume sampah semakin melonjak, sehingga dibutuhkannya edukasi sosial mengenai sosialisasi pengolahan sampah kepada seluruh warga. Pendidikan sedini mungkin akan membentuk pola perilaku yang menjadi kebiasaan dari warga kemudian membentuk pola pikir baru serta pandangan terhadap pemilahan dan pemanfaatan sampah.

Edukasi sosial yang dilakukan yaitu (1) Sosialisasi pengolahan sampah ke sekolah dan kampus, dengan memberikan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarang serta memilahnya, (2) Sosialisasi pengolahan sampah ke masyarakat, dengan memberikan kesadaran untuk memilah dan mengolah sampah dengan tepat pada tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT, (3) Promosi dengan figure pelitas, dengan melakukan aktivitas promosi berulang untuk menanamkan nilai-nilai kebersihan kepada anak-anak, (4) Acara hari peduli sampah nasional, untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya sampah apabila salah penanganan seperti kejadian Tragedi Leuwi Gajah pada 21 Februari 2004 di Jawa Barat, (5) Kunjungan masyarakat ke TPS3R, ITF, dan TPA, untuk mendorong partisipasi aktif dengan memberikan pengalaman tentang proses pengolahan sampah.

## **2. Evaluasi Input Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan.**

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dalam indikator evaluasi input pengelolaan sampah adalah indikator untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi

masukannya untuk dipergunakan dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, antara lain adalah sebagai berikut ;

1. Kriteria Evaluasi Efektifitas.

Ditinjau dari proses pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan terlihat belum mencapai kriteria efektif karena timbulan sampah terus meningkat pertahunnya, bahkan dalam satu hari jumlah produksi sampah di Kota Tangerang Selatan yaitu  $\pm$  400 ton/hari. Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki pada TPA Cipeucang mengakibatkan ketergantungan pada TPA lain, padahal seharusnya walau dengan lahan terbatas di TPA Cipeucang bukanlah menjadi masalah karena masyarakat telah melakukan pengurangan sampah pada skala rumah tangga (sumber). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang dilaksanakan kepada masyarakat belum menciptakan budaya baru guna mengatasi permasalahan sampah di Kota Tangerang Selatan.

2. Kriteria Evaluasi Efisiensi.

Timbulan sampah menumpuk yang diproduksi oleh Kota Tangerang Selatan dilakukan kerja sama dengan TPA lain yaitu TPAS Cilowong, dan TPAS Lulut Nambo Jawa Barat, tentu dengan pengeluaran anggaran yang sudah ditentukan. Sedangkan TPA yang dimiliki Kota Tangerang Selatan yaitu TPA Cipeucang memiliki keterbatasan lahan, bahkan lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga dan sungai Cisadane. Pada tahun 2020 luapan sampah dari TPA tersebut longsor sehingga sampahnya masuk ke sungai Cisadane (*Turap-Tpa-Cipeucang-Jebol-Longsoran-Sampah-Masuk-Ke-Sungai-Cisadane @ News.Detik.Com*, n.d.). Tentunya hal tersebut kembali menjadi permasalahan baru mengenai pencemaran air, kesehatan dan kebersihan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, warga yang tinggal di daerah dekat dengan TPA Cipeucang ingin dilakukannya pembebasan lahan namun masih terhambat oleh biaya anggaran, dan walaupun dapat terealisasi, struktur tanah dari TPA Cipeucang harus diperbaiki karena kondisi tanah yang menurun membuat persoalan sendiri sehingga masih banyak yang perlu dibenahi dari segi fasilitas, sarana, dan prasarana.

3. Kriteria Evaluasi Kecukupan.

Kebijakan yang telah dikeluarkan dalam bentuk regulasi belum mencukupi kebutuhan dari masyarakat Kota Tangerang Selatan, karena masih banyak yang perlu dipersiapkan mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dalam pengolahan sampah maupun pemberian edukasi pada masyarakat, kemudian keterbatasan teknologi sehingga belum diterapkan pada proses penanganan sampah di TPA, dan banyak timbul TPS liar dipinggir jalan yang tentunya merusak nilai estetika dari Kota Tangerang Selatan.

4. Kriteria Evaluasi Perataan.

Kriteria perataan dalam hal ini merupakan keadilan yang diberikan kepada masyarakat atas hasil implementasi dari kebijakan yang ada. Membahas mengenai perataan, seluruh program yang dilaksanakan guna mengurangi produksi sampah

belum dilakukan secara maksimal oleh Kota Tangerang Selatan yaitu mulai dari program Bank Sampah, Gerakan Sedekah Sampah, Komposter, Maggot, Biopori, Eco-Enzim, dan lain sebagainya belum diterapkan maksimal kepada masyarakat melalui edukasi-edukasi sosial yang dilaksanakan.

5. Kriteria Evaluasi Responsivitas.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat responsif mengenai regulasi/kebijakan yang telah diterapkan mengenai pengelolaan sampah hingga pengurangan sampah plastik, berbagai program juga berjalan baik dengan peran atau partisipasi aktif dari masyarakat, dibutuhkan keberlanjutan dalam pelaksanaan program-program yang telah ada dan bukan hanya sekedar formalitas saja. Masyarakat melakukannya dengan penuh kesadaran untuk keberhasilan serta kebersihan lingkungan di masa mendatang sehingga anak dan cucu generasi penerus bangsa akan memetik hal manis dari langkah kecil perbaikan yang dilakukan pada saat ini.

6. Kriteria Evaluasi Ketepatan.

Evaluasi ketepatan atau kelayakan belum menjadi kriteria dalam pengurangan, penanganan, dan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, karena kondisi TPA Cipeucang yang memprihatinkan dan butuh penanganan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

## **KESIMPULAN.**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan penelitian diatas maka dapat dibuat kesimpulan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan belum cukup baik karena beberapa hal sebagai berikut ; (1) Belum mencapai kriteria efektif karena timbulan sampah terus meningkat pertahunnya dan pengurangan sampah pada skala rumah tangga (sumber) belum memberikan dampak yang signifikan. (2) Ketergantungan Kota Tangerang Selatan terhadap TPA lain menandakan bahwa belum efisiennya pengentasan masalah sampah yang terjadi hingga saat ini dan diperlukannya kesiapan dari segi fasilitas, sarana, dan prasarana. (3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), ditemukannya TPS liar, dan timbulan sampah yang meningkat merupakan sebuah fenomena dimana belum tercukupinya kebutuhan masyarakat mengenai permasalahan sampah. (4) Seluruh program yang dilaksanakan oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan belum berjalan dengan baik dan masih harus melakukan evaluasi sehingga program berjalan secara berlanjut dan bukan hanya sebuah formalitas saja. (5) Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat responsif mengenai regulasi/kebijakan yang telah diterapkan mengenai pengelolaan sampah hingga pengurangan sampah plastik, berbagai program juga berjalan baik dengan peran atau partisipasi aktif dari masyarakat. (6) Indikator evaluasi ketepatan atau kelayakan belum dipenuhi oleh Kota Tangerang Selatan, mengingat kondisi TPA Cipeucang yang memprihatinkan sehingga dibutuhkan penanganan lebih lanjut untuk kedepannya.

Memang tidak ada yang sempurna dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang menjadi polemik di Kota Tangerang Selatan, namun sebuah usaha untuk mencapai

sesuatu hingga maksimal wajib kita terapkan sebagai warga masyarakat dan pemerintah untuk masa depan tata kelola sampah yang lebih baik.

## BIBLIOGRAFI

- Abdurahman, H., Suryadi, B., Riyadi Fitri, M., Febrina Nur, A., Devita Dwi Indri, A., Adina, S., Rajid Maulana, R., & Renita, L. (2021). *Dampak Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Masyarakat Pinggiran Sungai Kota Banjarmasin*.
- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2019). Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106–118.
- Akibu, R. S. (2014). Evaluasi kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di sma negeri 1 ampibabo kecamatan ampibabo kabupaten Parigi Moutong. *Katalogis*, 2(1).
- Bahri, S. (2015). Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman ( Dkpp ) Di Kabupaten Tangerang. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultas Ageng Tirtayasa*, 297.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2008). Buku Pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman. *Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta*.
- Dhuka, M. N. (2022). Perencanaan Strategis Mutu Pendidikan Agama Islam. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(4), 287–298.
- Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). *Jurnal Governansi*, 7(2), 99–110.
- Hidayat, F. (2021). *Analisis Strategi Pengelolaan Bank Sampah Dalam Collection Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Jibril, A. (2017). Efektivitas program perpuseru di perpustakaan umum Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Universitas Airlangga*, 6(2), 1–8.
- Lembong, F., Lopian, M. T., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Mandas, I. S. T., LENGKONG, F. D. J., & RURU, J. (2018a). Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di BKKBN Prov. Sulawesi Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(62).

Mandas, I. S. T., LENGKONG, F. D. J., & RURU, J. (2018b). Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di BKKBN Prov. Sulawesi Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(62).

MENDAGRI. (2008). *UU No. 18 Tahun 2008*. 69–73.

*Persampahan DLH 2023*. (n.d.).

Rifani, D. N., & Jalaluddin, A. M. (2019). Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7(1), 45–54.

Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 71–84.

Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di pemerintah kabupaten gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.

---

**Copyright Holder:**

Ayuni Damayanti Putri, Fiona Kirana Oktavia (2023)

**First publication right:**

Syntax Idea

**This article is licensed under:**

